

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Responsivitas atau daya tangkap adalah kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan, dan mengembangkannya ke dalam berbagai program pelayanan yang dapat mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Responsivitas mengukur daya tangkap organisasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan warga layanan, Agus Dwiyanto (2012:148) dalam (Ariska, 2018). Responsivitas Pemerintah menjadi kunci utama dalam menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Secara umum, Responsivitas Pemerintah dapat dilihat dari kemampuannya pemerintah untuk merespons dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Pemerintah yang responsive tidak hanya mendengarkan suara masyarakat, tetapi juga secara proaktif mencari solusi untuk masalah yang di hadapi. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih antara pemerintah dan masyarakat, dimana warga merasa di hargai dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan (Sihite, 2017).

Indonesia merupakan Negara yang berkembang dan salah satu negara yang memiliki permasalahan sosial yang kompleks, yang dimana salah satu permasalahan nya tentang keberadaan gelandangan dan pengemis yang dimana hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan pengemis, selain itu pengertian menurut peraturan adalah perilaku yang di jalankan oleh

seseorang untuk menerima penghasilan dengan cara meminta-minta, dengan menggunakan kondisinya biar mendapatkan belas kasihan dari orang lain, (Muhammad, 2024).

Indonesia masih didominasi oleh keberadaan pengemis. Alasan banyaknya pengemis bukan hanya karena kurangnya lapangan pekerjaan, namun juga karena kurangnya motivasi dan keterampilan, sehingga mereka memilih meminta-minta untuk memenuhi kebutuhannya dari pada mereka bekerja. (<https://search.app/6rdBs9BNxhHZMFGGr5>).

Pada saat ini yang menjadi permasalahan di provinsi Aceh salah satunya ialah masalah pengemis, yang dimana pengemis di Aceh masih aktif didalam beroperasi mengemis di wilayah-wilayah yang mereka inginkan, di wilayah daerah mereka tinggal, permasalahan pengemis di Aceh bertentangan dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 45 dan 46 Ayat 1, yang dimana Pasal 45 Ayat 1 menjelaskan bahwa Gelandangan dan Pengemis berhak atas kehidupan dan penghidupan yang layak dalam masyarakat, dan Pasal 46 Ayat 1 menjelaskan kembali bahwa Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyelenggarakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk meningkatkan kehidupan dan penghidupan yang layak bagi gelandangan dan pengemis.

Provinsi sudah mengeluarkan aturan bahwa pemerintah daerah harus mengatasi masalah gelandangan dan pengemis, akan tetapi di Kabupaten Bireuen sendiri masih banyak terjadi kasus terkait pengemis, padahal Kabupaten Bireuen sendiri mempunyai peraturan tentang permasalahan pengemis yang ada di Kota Bireuen, dimana adanya

peraturan Bupati Bireuen Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bireuen, serta dilanjut dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 276 Tahun 2023, Tentang Pembentukan Tim Penertiban Gelandangan Dan Pengemis

Kegiatan Pemberi Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat Pada Dinas Sosial, Kabupaten Bireuen. (Halim & Iskandar, 2019)

Kehadiran pemerintah, khususnya dinas sosial Kabupaten Bireuen sangat penting dalam menanggulangi kemiskinan di daerah tersebut, sebagaimana tugas dan fungsi mereka, dinas sosial bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial, termasuk upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan, namun untuk menjalankan tugas ini secara efektif, pemerintah juga membutuhkan dukungan yang mencakup sumber daya manusia yang memadai, sarana prasarana yang memadai, alokasi anggaran dari APBD, dan material yang efisien. Jika semua aspek ini terpenuhi, maka tujuan program tersebut dapat tercapai dengan hasil yang optimal. (Damayanti & Adnan, 2017).

Karakteristik umum pengemis yang ada di Kabupaten Bireuen termasuk di bawah garis kemiskinan dikarenakan kurangnya pekerjaan tetap dan layak, seringkali menggunakan pakaian yang tidak pantas dan kotor karena prioritas utama mereka adalah memenuhi kebutuhan makanan, kurangnya kepercayaan diri dan kurangnya disiplin diri

menyebabkan mereka terlihat dalam tindakan pengemisan, kurangnya kesadaran akan tanggung jawab sosial dan kurangnya partisipasi dalam interaksi sosial yang lebih luas, tingkat pendidikan yang rendah dan kekurangan keterampilan, sering tidak memiliki tempat tinggal yang layak atau bahkan tidak memiliki tempat tinggal sama sekali, serta kekurangan identitas resmi. (Lilis suryani, 2019).

Berdasarkan observasi peneliti Pengemis di Kabupaten Bireuen di golongankan angka tinggi , Pengemis di Kabupaten Bireuen masih beroperasi di Daerah Kota Bireuen seperti Cafe, *Traffic Light*, Pendopo, Bundaran Bireuen, teguh, tempat-tempat makan, pasar dan rek jalanan langgaran yang ada di Kota Bireuen. Kehadiran pengemis di Kabupaten Bireuen memunculkan beragam masalah sosial, yang secara mendasar terkait dengan ketertiban dan keamanan di wilayah perkotaan, yang membuat Pertumbuhan jumlah pengemis diyakini dapat memperbesar risiko gangguan terhadap keamanan dan ketertiban, yang pada giliranya berpotensi mengganggu stabilitas pembangunan perkotaan.

Data mengenai pengemis di Kabupaten Bireuen dapat di temukan dalam tabel di bawah ini:

Tabel1.1.
DataPengemisDiKabupatenBireuen

No	Tahun	Jumlah
1	2022	15
2	2023	18
3	2024	25
Total		58

Sumber:Dinas sosial Kabupaten Bireuen,2024

Berdasarkan tabel di atas, menunjukan bahwa jumlah pengemis di Kabupaten Bireuen di golongan angka tinggi, pengemis di Kabupaten Bireuen di setiap tahunnya meningkat, dan angka pengemis di Bireuen mencapai 25 orang pada tahun 2022. Tingginya Pengemis di Kabupaten Bireuen di sebabkan oleh faktor ekonomi, kurangnya pendidikan. Hal ini menunjukan penanganan masalah pengemis di Kabupaten Bireuen belum efek tidak perlunya respon dari pemerintah. Salah satu contoh pengemis anak-anak yang sering terlihat di Kabupaten Bireuen adalah seorang bocah memegang gelas kecil untuk meminta sumbangan, Dengan pakaian yang compang-camping dan wajah yang penuh harapan, ia mencerminkan keadaan sulit yang dihadapi banyak anak di daerah tersebut, yang seharusnya bisa menikmati pendidikan dan masa kecil yang baik.

Gambar 1.1.
pengemis di Traffic Light



sumber: dokumentasi peneliti 2024

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf kordinasi pengemis dinas sosial menyatakan dampak negatif dari pengemis yang dimana terjadinya kemacetan alur lintas kota dan jalan, serta menimbulkan kericuhan kota akibat kemacetan yang di buat oleh pengemis disaat mengemis, hingga terjadinya kecelakaan bagi pengemis yang membawa anak kecil, dan berdampak pada pendidikan anak tersebut yang tidak bersekolah karena mengikuti orangtuanya saat mengemis, serta adanya pergaulan ikut-ikutan

mengemis dari anak-anak lain yang meresahkan warga dan kota. Selain itu, banyak keluhan dari masyarakat yang merasa terganggu oleh maraknya pengemis di seputaran Simpang Empat Kota Bireuen, yang dimana-mana anak-anak dibawa saat mengemis, tentu membahayakan keselamatan anak-anak bila mengemis di jalan besar yang biasa mereka lakukan, (<https://regional.kompas.com/read>), dan saat meminta-minta sedekah mereka sering menggores mobil dan marah-marah bila tidak diberikan uang, hal tersebut sangat meresahkan warga tentunya, (<https://dinsos.acehprov.go.id>).

Secara khusus, Responsivitas Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam menangani permasalahan pengemis dapat dilihat dari sejauh mana pemerintah mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar mereka. Pengemis dimana mereka membutuhkan akses lapangan pekerjaan, modal usaha kecil, dan bantuan keuangan untuk memenuhi kebutuhan mereka, selain itu Pemerintahan Kabupaten Bireuen telah menetapkan program dalam upaya menangani permasalahan pengemis, yang dimana program tersebut adalah sandang dan pangan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar gelandangan dan pengemis, Namun program ini masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan.

Pengemis sering kali menjadi manifestasi dari kemiskinan perkotaan yang dipicu oleh tekanan ekonomi dan kebutuhan hidup yang meningkat, masyarakat merasa tidak nyaman dalam melakukan aktivitas. Permasalahan pengemis masih menjadi beban pembangunan nasional saat ini oleh karena itu, peran pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi

permasalahan ini harus dilakukan bersama- sama agar kesenjangan sosial dapat dikurangi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis responsivitas pemerintahan Kabupaten Bireuen dalam penanganan permasalahan pengemis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bireuen dalam upaya meningkatkan efektivitas penanganan permasalahan gelandangan dan pengemis melalui peningkatan responsivitas.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih jauh tentang permasalahan pengemis yang semakin tahun jumlahnya bertambah, yang penulis akan uraikan

dalam bentuk skripsi dengan judul **“Responsivitas Pemerintah Dalam Penanganan Pengemis di Kabupaten Bireuen”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas,maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana responsivitas pemerintah dalam menangani permasalahan pengemis?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat responsivitas pemerintahan Kabupaten Bireuen dalam menangani permasalahan pengemis?

1.3 Fokus Penelitian

Sesuai latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah di paparkan maka yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Responsivitas pemerintah Kabupaten Bireuen dalam menangani permasalahan pengemis di dalam hal kecepatan penyelesaian dan tingkat eskalasi.
2. Faktor-faktor yang menghambat responsivitas pemerintah Kabupaten Bireuen menangani permasalahan pengemis

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sesuai dengan fokus penelitian yang telah di paparkan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan utama penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana responsivitas pemerintahan Kabupaten Bireuen dalam menangani permasalahan pengemis?

2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat responsivitas pemerintahan Kabupaten Bireuen dalam menangani permasalahan pengemis?

1.5 Manfaat Penelitian

Ada pun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Pelayanan pemerintahan dan administrasi publik, terkait dengan konsep responsivitas birokrasi dalam menangani permasalahan sosial.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan rekomendasi bagi Kabupaten Bireuen, khususnya pemerintahan, dalam meningkatkan responsivitas dalam menangani permasalahan pengemis di wilayah kota.